

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya digunakan untuk melihat keberhasilan suatu negara atau daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Lincoln Arsyad, 1999). Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap program pembangunan realistik yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan (Todaro, 2000).

Penelitian terhadap pertumbuhan ekonomi di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat diukur dengan melihat pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dari tahun 2010-2014 PDB atas dasar harga berlaku dan menurut lapangan usaha selalu mengalami peningkatan yaitu dari Rp6.864.133,1 Miliar hingga Rp10.542.693,5

Miliar, sehingga dengan melihat angka tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya dilihat dari pertumbuhan secara Nasional, tetapi juga perlu dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi di setiap daerah maupun wilayahnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam mensejahterkan masyarakatnya secara merata serta untuk mempermudah analisa ekonomi yang lebih mendalam. Setiap daerah dalam pelaksanaan program kerjanya mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk keterikatan yang dapat membangun kerjasama yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada. Hal tersebut juga berfungsi untuk memperkuat persatuan dan kestuan bangsa serta dapat meningkatkan pemberdayaan potensi daerah dengan maksimal. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

Mulai dari tahun 2001, otonomi daerah telah diberlakukan di Indonesia dimana para ekonom mulai memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23

tahun 2014, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, dapat menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian suatu daerah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan (*decision maker*) di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, perkembangan perekonomian suatu daerah juga sangat mungkin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah di sekitarnya baik positif maupun negatif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu (BPS, 2014).

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah yang kaya akan budaya dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Kegiatan ekonomi DIY bertumpu pada empat sektor andalan yaitu : perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa, pertanian serta industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan angka PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 nilai PDRB DIY atas dasar harga berlaku nilainya mencapai Rp63,69 Triliun, sementara pada tahun 2009 nilainya sebesar Rp41,41 Triliun atau selama lima tahun meningkat sebesar Rp22,28 Triliun (BPS,

2014). Meskipun angka pertumbuhan ekonomi DIY terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, DIY tetap memiliki kontribusi yang paling rendah terhadap perekonomian nasional jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Berikut ini adalah tabel persentase kontribusi seluruh provinsi di Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional:

**TABEL 1.1.**

Kontribusi PDRB di Pulau Jawa dari 33 Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013

<b>Provinsi</b>	<b>PDRB ADHK 2000</b>	<b>Kontribusi</b>
DKI Jakarta	477.285.245,38	17,93%
Jawa Barat	386.838.839,6	14,54%
Banten	105.856.068,16	3,98%
Jawa Tengah	223.099.740,34	8,38%
DI Yogyakarta	24.567.476,12	0,92%
Jawa Timur	419.428.445,69	15,76%
<b>Pulau Jawa</b>	<b>1.637.075.815,39</b>	<b>57,99%</b>
<b>33 Provinsi di Indonesia</b>	<b>2.661.070.761,64</b>	<b>100%</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY

Tabel 1.1. di atas menggambarkan kontribusi PDRB di Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pulau Jawa memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kontribusi terbesar di pulau Jawa yaitu sebesar 17,93 % yang dicapai oleh DKI Jakarta, sedangkan kontribusi terendah sebesar 0,92 % yang dicapai oleh DIY. Rendahnya kontribusi DIY dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional dikarenakan DIY dalam perkembangannya memang merupakan daerah pusat pendidikan dan kebudayaan sehingga tidak banyak aktivitas ekonomi yang berskala besar berlokasi di DIY (BPS, 2014).

Kontribusi sektor konstruksi dalam pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013 relatif sama dengan tahun 2012. Kegiatan pembangunan bangunan tempat tinggal, hotel dan gedung perkantoran serta perbaikan jalan mendorong perkembangan sektor konstruksi. Seperti tahun 2012, kontribusi sektor konstruksi terhadap pembentukan PDRB DIY tahun 2013 sebesar 10,85 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2012 sektor ini menyumbang 20,06 persen, di tahun 2013 naik menjadi 20,65 persen. Ternyata sektor perdagangan, hotel dan restoran sekarang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian DIY melewati kontribusi sektor jasa-jasa yang kontribusinya 20,16 persen (BPS, 2014). Berikut ini merupakan tabel PDRB setiap kabupaten di DIY :

**TABEL 1.2.**

Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY ADHK 2000 (Juta Rupiah), dan Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB DIY Tahun 2013

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>ADHK 2000</b>	<b>Kontribusi</b>
Kulonprogo	2.062.182	8,40%
Bantul	4.645.476	18,91%
Gunungkidul	3.830.400	15,60%
Sleman	7.471.898	30,41%
Kota Yogyakarta	6.498.900	26,45%
<b>DIY</b>	<b>24.567.476</b>	<b>100%</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah sekitar 3.185,8 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 5 wilayah administratif kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk melihat kinerja perekonomian kelima kabupaten/kota di DIY memang tidak dapat dipisahkan dari analisis spasial (tata ruang/geografis),

karena kelima wilayah tersebut kemungkinan besar mempunyai keterkaitan erat secara sosial demografis. Namun, untuk sekedar membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif antar daerah, maka dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota sebagai indikator makro. Tabel 1.2. menggambarkan bahwa Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang memiliki nilai PDRB paling tinggi yaitu sebesar Rp7.471.898, sedangkan kabupaten Kulonprogo yang memiliki nilai terendah yaitu hanya sebesar Rp2.062.182. Dari tabel tersebut juga menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013 yang hanya sebesar 5,40 persen, masih berada di bawah persentase pertumbuhan secara nasional yaitu sebesar 5,90 persen. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari luas wilayah, sumberdaya alam serta dari potensi setiap daerahnya.

Pada tabel 1.2. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2013 hanya memiliki kontribusi yang sangat rendah yaitu hanya sebesar 15,60 persen atau peringkat keempat dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi DIY. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kondisi sebagian besar lahan pertanian pegunungan berbatu sehingga cara penanaman dan produktivitas komoditas pertaniannya juga tidak seperti di lahan pertanian subur. Sementara itu, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah terkecil tetapi mampu menyumbang 26,45 persen dalam pertumbuhan ekonomi DIY. Sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan

ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai, sehingga terdapat banyak aktivitas ekonomi di setiap sektor (BPS 2014).

Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara berusaha untuk menarik perhatian para investor agar tetap meningkatkan investasinya. Adanya otonomi daerah mengakibatkan desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk menentukan pola dan prioritas pembangunan, maka beberapa daerah menetapkan pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi oleh pemerintah melalui dana pembangunan dan merangsang pertumbuhan investasi swasta yang diharapkan mempunyai efek multiplier terhadap penyerapan tenaga kerja.

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal (Sukirno, 2010).

Secara regional, penanaman modal di DIY masih terkonsentrasi di Sleman dan Kota baik untuk PMDN maupun PMA. Hal ini, membawa dampak kesenjangan ekonomi antar wilayah. Berikut ini adalah tabel realisasi PMDN dan PMA di wilayah DIY tahun 2013 :

**TABEL 1.3.**

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Tahun 2013 menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PMDN</b>	<b>PMA</b>
Kulonprogo	34.017.508.942	3.078.450.000
Bantul	241.023.193.711	226.255.372.675
Gunungkidul	35.502.559.948	96.339.580.000
Sleman	1.242.243.389.418	2.720.103.359.364
Kota Yogyakarta	1.311.867.839.735	2.157.338.880.844
<b>DIY</b>	<b>2.864.654.491.754</b>	<b>5.203.115.642.883</b>

Sumber : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal D.I.Yogyakarta

Tabel 1.3. menunjukkan jumlah realisasi investasi yang terdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Penanaman modal di DIY terlihat masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk mengangkat potensi unggulan di tiga kabupaten tersebut dan mempromosikannya kepada calon investor potensial. Adapun Perusahaan yang merealisasikan investasinya (aktif) sejumlah 224 perusahaan (119 PMA dan 105 PMDN) dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA (BKPM 2015). Wilayah Gunungkidul dengan jumlah Rp37.095.958.942 dan Kulonprogo dengan jumlah Rp131.842.139.948 adalah kabupaten yang memiliki jumlah penanaman modal paling rendah jika dibandingkan dengan tiga Kabupaten lain di DIY. Hal tersebut disebabkan karena Gunungkidul dan Kulonprogo masih termasuk daerah yang tertinggal di DIY sehingga para investor tidak begitu tertarik. Sebagai investor akan cenderung memilih untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan atau suatu badan

usaha yang sudah memiliki badan hukum dan yang memiliki potensi untuk dapat menghasilkan laba yang besar.

Perbaikan iklim penanaman modal ini sangat penting, karena dengan adanya investasi yang tinggi maka akan menambah produktivitas barang dan jasa. Teori Harrod-Domar juga memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara juga akan rendah. Dewasa ini di Indonesia kesempatan berinvestasi semakin terbuka, terutama bagi penanaman modal asing yaitu dengan adanya *ASEAN Economic Community* (AEC) serta kerjasama lainnya yang mengarah pada kebebasan dalam berekonomi.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi (Sajafii, 2009).

Jumlah penduduk yang besar dalam perekonomian dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Pandangan optimis mengenai peran pertambahan penduduk terhadap pembangunan ekonomi salah satunya dikemukakan oleh Adam Smith (1729-1790) bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai

mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Pertumbuhan penduduk terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memandang sebagai faktor produksi, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (*labour force*). Semakin banyak angkatan kerja semakin meningkat tenaga produktif, sehingga akan meningkatkan produksi. Dengan demikian semakin bertambah jumlah penduduk akan meningkatkan produksi barang dan jasa yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014”**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat ruang lingkup pertumbuhan ekonomi daerah sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah dengan melihat seberapa besar pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dibatasi dengan pengeluaran pemerintah, investasi meliputi PMDN dan PMA, dan tenaga kerja yang sudah bekerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menggunakan data PDRB dengan harga konstan tahun 2010.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai gambaran bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka penentuan arah dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi.
2. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai besarnya pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.